

INDONESIA'S STRATEGY TO REALIZE ASEAN OUTLOOK ON INDO-PACIFIC (AOIP) TO CREATE STABILITY IN THE INDO-PACIFIC REGION

STRATEGI INDONESIA MEWUJUDKAN ASEAN OUTLOOK ON INDO-PACIFIC (AOIP) UNTUK MENCIPTAKAN STABILITAS DI KAWASAN INDO-PASIFIK

Langgeng Gilang Pangestu^{1*}, Rizky Hikmawan¹, Laode Muhamad Fathun¹

¹Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
Surel: gilanglanggeng.lg@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to see the Indonesian strategy for realizing AOIP in context of creating stability in Indo-Pacific region which is impacted by geostrategic impacts. Today a new region is forming, the Indo-Pacific which is based on a variety of potential within. This environment creates colliding interests of various countries. Rivalry between China and the United States is inevitable, the impact of which is on regional stability. Indonesia, which is right in the heart of the Indo-Pacific, faces various threats, national interests, regional stability and ASEAN centrality. This paper uses the concepts of national interest, strategic environment, security community, and diplomacy with a descriptive qualitative research approach (literature study and interviews) that describes the research problem empirically. The results of the study describe the process from the creation of the ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) to being approved by ASEAN.

Keywords: ASEAN, Diplomacy, Indonesia, Indo-Pacific

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini untuk melihat strategi Indonesia dalam mewujudkan AOIP dalam rangka menciptakan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik yang mendapatkan dampak akibat dari pergeseran geostrategis. Dewasa ini terbentuklah sebuah kawasan baru yakni Indo-Pasifik yang didasari dari beragam potensi yang didalamnya. Lingkungan tersebut menciptakan bertabrakannya kepentingan berbagai negara. Rivalitas antara China dan Amerika Serikat tidak bisa dihindari, dampaknya yakni kepada stabilitas kawasan. Indonesia yang berada tepat di jantung Indo-Pasifik dihadapi berbagai ancaman, kepentingan nasional, stabilitas kawasan, dan sentralitas ASEAN. Tulisan ini menggunakan konsep kepentingan nasional, lingkungan strategis, Security Community, dan diplomasi dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif (studi pustaka dan wawancara) yang mendeskripsikan permasalahan penelitian secara empiris. Hasil penelitian menjelaskan proses dari pembuatan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) hingga disetujui oleh ASEAN.

Kata Kunci: ASEAN, Diplomasi, Indonesia, Indo-Pasifik

Diajukan: 27 Maret 2021

Direvisi: 29 April 2021

Diterima: 16 Juni 2021

Sitasi: Pangestu, L. G., Hikmawan, R., dan Fathun, L. M. (2021). Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook On Indo-Pacific (AOIP) untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 26 (1), 1-22.

Pendahuluan

Indo-Pasifik muncul sebagai konsep geografis yang mencakup kawasan Lautan Hindia dan Lautan Pasifik sejak Guurpet S. Kurana menggunakan kata “Indo-Pacific Strategy” pada tahun 2007 sebagai seorang Marine Strategist dan Direktur Eksekutif The New Delhi National Marine Foundation (Herindrasti, 2019). Istilah Indo-Pasifik digunakan sebagai pengganti istilah yang melekat sebelumnya yaitu Asia-Pasifik, dengan perbedaan mendasar penekanan pada wilayah yang berkaitan dengan perairan. Kawasan tersebut telah menjadi kawasan yang diperebutkan oleh berbagai negara dan kepentingannya.

Indo-Pasifik telah menjadi area sentral dalam pembahasan isu geopolitik maritim, keamanan, perdagangan, dan kegiatan lingkungan. Wilayah Indo-Pasifik juga berdiri di persimpangan perdagangan internasional, dengan sekitar 32,2 juta barel minyak mentah melewati setiap tahun dan 40% dari ekspor global berasal dari wilayah tersebut (Tertia & Perwita, MARITIME SECURITY IN INDO-PACIFIC: ISSUES, CHALLENGES AND PROSPECTS, 2018). Dengan meningkatnya kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, negara-negara eksportir saling berkompetisi untuk memasarkan produknya di kawasan tersebut. Persaingan itu tidak terbatas pada tingkat perdagangan internasional, namun juga pada investasi langsung ke sejumlah pasar di Indo-Pasifik untuk jaringan distribusi, industri manufaktur serta investasi pembangunan prasarana ekonomi seperti pelabuhan, jalan raya, jalur kereta api, pembangkit listrik serta perbankan (Montratama, 2016).

Indo-Pasifik kembali menjadi sorotan setelah Jepang mengumumkan konsep Free and Open in Indo-Pacific (FOIP) yang diumumkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2016. Pandangan Abe berakar pada keamanan, ekonomi, dan maritim. Baru kemudian pada tahun 2017, Presiden Trump mengumumkan visi negara AS free and open Indo-Pacific di KTT APEC di Vietnam, dan komitmennya untuk wilayah yang aman, terjamin, makmur, dan bebas yang menguntungkan semua negara (The Department of Defense USA, 2019). Dibalik kekuatan besar yang memang sudah dimiliki oleh Amerika Serikat. Ia juga didukung oleh barisan kekuatan dibelakangnya yang setuju dengan konsep Indo-Pasifik menurutnya. Basis pendukungnya yakni Quad yang beranggotakan AS, Jepang, Australia, dan India.

China merupakan alasan kuat keberadaan Quad di kawasan Indo-Pasifik. Pengaturan Quad dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka adalah semacam kompetisi halus melawan inisiatif Belt Road Initiative (BRI) China (Saha, 2018). Wilayah ini, bagaimanapun, tetap menjadi pilar penting di BRI China. Pangsa kekuasaan China luas di wilayah tersebut, terlebih terdapat salah satu titik kekuasaannya yang selalu menjadi sengketa yaitu Laut China Selatan (LCS). Selain itu dominasi militer China seperti di LCS dan Laut Timur dianggap telah menimbulkan ancaman terhadap stabilitas keamanan kawasan.

Dengan kedatangan para aktor besar di kawasan Indo-Pasifik selain mendatangkan keuntungan dengan bertambahnya tingkat ekonomi, datang pula ancaman terhadap stabilitas keamanan pada kawasan. Pada dasarnya ancaman bersama di kawasan Indo-Pasifik tidak jauh dari sengketa batas wilayah dan pada keamanan maritim (Purnama, 2017). Saat ini isu keamanan terhadap stabilitas keamanan digadang-gadang akan

meningkat. Perebutan kekuasaan oleh para aktor yang berkontestasi akan mengganggu perdamaian di kawasan.

Selain itu keberadaan AS dan China di dalam kawasan ternyata juga membawa dampak terhadap ASEAN. Terdapat negara ASEAN yang lebih condong ke arah AS ataupun China. Kedekatan antar negara yang berbeda menghasilkan perbedaan arah dukungan, sehingga dapat berpotensi menimbulkan perpecahan. Negara yang tergabung dalam ASEAN sebaiknya bersikap sesuai dengan norma-norma yang berlaku selama ini. Mereka harus dapat menjaga netralitas atau tidak memihak salah satu kekuatan. Apabila netralitas tersebut tidak dapat dijaga maka menjadi sebuah ancaman nyata bagi keutuhan ASEAN. Serta berpengaruh menjadi ancaman terhadap negara didalam ASEAN sendiri.

Kawasan yang tidak stabil tentu menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan titik temu diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia yang saat ini sedang menjalankan visi Poros Maritim Dunia (PMD) merasa bahwa kontestasi antara AS dan China akan mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Oleh karenanya Indonesia harus memiliki kebijakan tertentu yang mampu mengatasi persoalan perebutan kekuasaan yang sedang terjadi antara AS dan China di kawasan Indo-Pasifik. Akan tetapi Indonesia sendiri berada dalam dilema, karena pada dasarnya Indonesia memiliki hubungan baik dengan kedua negara tersebut.

Indonesia tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi ancaman ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni melalui ASEAN. Mengingat bahwa ASEAN merupakan soko guru kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga sudah sewajarnya Indonesia mengajak negara-negara didalam ASEAN untuk turut menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang lebih stabil. Selain itu Indonesia pun sadar bahwa terdapat benih-benih perpecahan dalam tubuh ASEAN dikarenakan kawasan tersebut berpengaruh terhadap netralitas dari beberapa negara anggota. Dengan menjaga netralitas maka keamanan regional dapat dipelihara dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi permasalahan ini dengan membuat seperangkat pemahaman bersama tentang Indo-Pasifik di level Asia tenggara melalui ASEAN Outlook on Indo-Pacific.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana pendekatan ini menjadi sebuah metode ilmiah yang sering digunakan peneliti dalam bidang ilmu sosial. Penelitian kualitatif atau qualitative research merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya (Nugrahani, 2014). Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana metode deskriptif sendiri merupakan sebuah metode yang melukiskan sebuah keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Dalam penelitian ini, dipergunakan dua sumber pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan yakni wawancara, jurnal terdahulu serta dokumen-dokumen yang ada. Terdapat beberapa narasumber yang diwawancarai, diantaranya

Asisten Peneliti di Departemen Hubungan Internasional CSIS, perwakilan BPPK, Kementerian Luar Negeri RI, dan perwakilan Kementerian Luar Negeri RI.

Hasil dan Diskusi

Konsep Kepentingan Nasional

Dalam konsep kepentingan nasional menurut Hans J Morgenthau bahwa kepentingan nasional adalah kemampuan minimum dari suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas politik, militer dan budaya dari gangguan negara lain (Morgenthau, 1948). Donald E. Nuechterlein mendefinisikan bahwa kepentingan nasional adalah suatu kebutuhan dan keinginan dari satu negara berkaitan dengan negara-negara lainnya dari lingkungan eksternal (Nuechterlein, 1976). Ada beberapa jenis kepentingan nasional, Donald E. Nuechterlein dalam menyebutkan sedikitnya ada empat jenis kepentingan nasional yaitu kepentingan pertahanan, ekonomi, tata internasional dan ideology.

Sedangkan menurut Fred A. Sondermann menjelaskan bahwa kepentingan nasional berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam kebijakan luar negeri, yang nantinya akan menjadi sikap oleh negara tersebut dalam menyikapi suatu isu internasional (Sondermann, 1960). Konsep kepentingan nasional ini penulis gunakan untuk menganalisis keterkaitan Indonesia yang berusaha untuk bergerak menjalankan kepentingan nasionalnya.

Lingkungan Strategis

Setiap aktor dalam level internasional akan saling mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing, sehingga lingkungan strategis menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara. Lingkungan Strategis dapat dipindai melalui berbagai dimensi, Bandoro menyatakan dimensi keamanan (*security*), ekonomi (*economics*), politik (*politics*), sosial (*societal*), teknologi (*technology*), dan lain sebagainya dikaji untuk memindai lingkungan strategis (Putra & Hakim, 2016).

Sifat lingkungan strategis menantang karena konsekuensi dari keputusan dan persyaratan kinerja yang unik. Menurut Owen Jacobs mengungkapkan lingkungan strategis memiliki sifat VUCA, yaitu volatil (*volatility*), penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*), sangat kompleks (*complexity*), dan ambigu (*ambiguity*). Volatil (*Volatility*) merupakan sifat lingkungan strategis yang begitu cepat berubah. Ketika sifat perubahan yang begitu cepat melahirkan sifat ketidakpastian (*Uncertainty*) dalam lingkungan strategis. Hubungan antar elemen dalam lingkungan strategis begitu kompleks (*Complexity*). Perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi semakin tidak mudah dalam lingkungan strategis karena sifat kebiasaan (*Ambiguity*) (Putra & Hakim, 2016). Konsep Lingkungan Straregis penulis gunakan untuk menganalisa situasi dikawasan yang sedang mengalami pergeseran dengan terbentuknya lingkungan Indo-Pasifik.

Konsep *Security Community*

Gagasan tentang komunitas keamanan pertama kali muncul sekitar tahun 1957 dengan Karl Deutsch dan rekan-rekannya ketika mereka melakukan penelitian tentang bagaimana perang dapat dicegah terjadi di masa depan, mereka menggunakan studi kasus sejarah sebagai dasar mereka (Deutsch, 1957). Muncul dengan kesimpulan bahwa perang dapat dihindari jika ada rasa kebersamaan atau integrasi antar negara. Komunitas keamanan dianggap sebagai kelompok yang telah terintegrasi, dimana integrasi didefinisikan sebagai pencapaian rasa kebersamaan, disertai dengan lembaga atau praktik formal atau informal, cukup kuat dan luas untuk memastikan perubahan damai di antara anggota kelompok. dengan kepastian 'masuk akal' selama periode 'panjang'. Sehingga konsep komunitas keamanan menggambarkan kelompok negara yang telah mengembangkan kebiasaan jangka panjang untuk interaksi damai dan mengesampingkan penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan perselisihan dengan anggota kelompok lainnya (Acharya, 2001).

Emmanuel Adler dan Michael Burnett memperluas pemikiran Deutsch dan rekan-rekannya dengan Volume Komunitas Keamanan dalam mengidentifikasi bahwa kunci untuk komunitas keamanan adalah komunikasi yang konsisten dan progresif antara peserta karena inilah yang mendorong integrasi (Adler & Barnett, 1998). Mereka mengambil ide lebih jauh dan menyarankan bahwa komunitas ada di tingkat internasional dan memainkan peran yang mendalam dalam membentuk politik keamanan. Konsep komunitas keamanan terdiri dari tiga elemen kunci, menurut Adler dan Barnett. Pertama, anggota komunitas keamanan telah berbagi identitas, nilai, dan makna. Kedua, mereka memiliki hubungan banyak sisi dan langsung. Ketiga, mereka memiliki minat jangka panjang yang sama. Konsep ini penulis gunakan untuk menjelaskan pembentukan AOIP oleh ASEAN, dimana ASEAN merupakan bagian yang terdampak langsung dengan meningkatnya kegiatan di kawasan Indo-Pasifik.

Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu instrumen yang penting dalam pelaksanaan mencapai kepentingan nasional suatu negara. Salah satu definisi diplomasi yang paling banyak dikutip adalah Penggambaran diplomasi Hedley Bull, menurutnya diplomasi "perilaku hubungan antara negara dan entitas lain dengan berdiri dalam politik dunia oleh agen resmi dan dengan cara damai" (Aksoy, 2018). Hedley Bull menunjukkan empat fungsi diplomasi. Yang pertama dari fungsi-fungsi ini adalah untuk memungkinkan komunikasi diplomatik antara berbagai komponen dalam politik global dan di antara para pemimpin negara. Fungsi kedua diplomasi yang disampaikan oleh Bull adalah untuk menegosiasikan perjanjian. Fungsi ketiga diplomasi, menurut Bull, adalah untuk mengumpulkan informasi intelijen dan yang berkaitan dengan negara lain. Fungsi keempat dari diplomasi adalah untuk meminimalkan konflik yang muncul dalam politik internasional.

Berdasarkan aktornya, diplomasi ada yang bersifat bilateral (dua negara), regional (negara-negara kawasan), dan multilateral (banyak negara). Diplomasi multilateral

berurusan dengan beberapa pemerintah secara bersamaan. Dalam diplomasi multilateral, pemerintah Anda tidak hanya berurusan dengan beberapa pemerintah pada satu waktu, tetapi pemerintah-pemerintah lain juga berinteraksi satu sama lain (Walker, 2004). Terdapat beberapa tujuan diplomasi multilateral, setidaknya ada sembilan alasan berbeda yang mendorong pemerintah untuk saling terlibat secara multilateral. Diantaranya yaitu *Information gathering and pooling, Joint projects, Managing the external environment, Influencing behavior, Mutually beneficial deals, Domestic agendas, Reactively, Routine, Idealism*. Konsep diplomasi penulis gunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi cara dan proses yang dilakukan oleh Indonesia dalam usahanya mewujudkan AOIP.

Kemunculan Kawasan Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik yang merupakan penggabungan dari wilayah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Setidaknya ada lebih dari 50 negara yang berada pada lingkaran Indo-Pasifik. Samudra Hindia, lautan ketiga terbesar di dunia (setelah Pasifik dan Atlantik), menempati sekitar 20 persen permukaan laut Bumi, yang meliputi area total 73,56 juta mil persegi (Michel & Sticklor, 2012). Wilayah Samudra Hindia mengandung banyak mineral, minyak, dan gas alam. Negara-negara bagian kawasan Samudra Hindia memiliki lebih dari dua pertiga cadangan minyak dunia yang diketahui. Sehingga wilayah Samudra Hindia diyakini kaya dengan cadangan energi (Albert, 2016). Setidaknya 35 persen cadangan gas dunia, 60 persen uranium, 40 persen emas, 80 persen dari semua cadangan intan, dan sejumlah besar berbagai zat mineral lainnya (Future Directions International, 2012).

Samudra Pasifik memiliki luas sekitar 63,8 juta mil persegi (165,25 juta km persegi). Samudra Pasifik jauh sangat lebih luas dibanding Samudra Hindia dan Samudra Atlantik, Selain itu luasnya lebih dari sekadar permukaan daratan bumi. Samudra Pasifik membentang dari pantai Antartika ke Selat Bering hingga 135° garis lintang, sekitar 15.600 mil (15.500 km). Luas memanjang terbesarnya adalah sekitar 19.000 mil (19.300 km) di sepanjang garis lintang 5°LU, antara pantai-pantai Kolombia di Amerika Selatan dan Semenanjung Melayu di Asia. Kedalaman rata-rata adalah 14.040 kaki (4.280 meter), dan kedalaman terbesar yang diketahui adalah 36.201 kaki (11.034 meter) yakni di Palung Mariana (Cotter, Bardach, & Morgan, 2019).

Sebagian besar negara bagian Samudra Hindia terus mengeksplor bahan mentah dan mengimpor barang-barang manufaktur yang diproduksi di tempat lain, dengan beberapa pengecualian seperti Australia, India, dan Afrika Selatan. Minyak mendominasi perdagangan, karena Samudra Hindia telah menjadi jalur penting untuk pengangkutan minyak mentah ke Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur. Komoditas utama lainnya termasuk besi, batu bara, karet, dan teh. Makanan laut olahan telah muncul sebagai barang ekspor utama dari negara-negara pesisir. Selain itu, pariwisata telah menjadi semakin penting di banyak pulau (Verlaan, Morgan, & Kanayev, 2020).

Samudra Hindia menyediakan rute pelayaran internasional yang penting. Oman, Yaman, Somalia, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, dan Indonesia adalah negara pesisir yang mengelilingi Samudra Hindia (Tertia & Perwita, Maritime Security In

Indo-Pacific: Issues, Challenges And Prospects, 2018). Pengiriman di Samudera Hindia dapat dibagi menjadi tiga komponen: dhow, pengangkut kargo kering, dan tanker.

Sedangkan di kawasan Samudra Pasifik sejak pertengahan abad ke-20, telah terjadi pertumbuhan luar biasa dalam perdagangan antara Lingkar Pasifik barat. Terutama China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Amerika Utara, dan tidak tertinggal Amerika Serikat. Perdagangan juga telah berkembang antara Amerika Utara dan negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Pada wilayah Pasifik barat, perdagangan meningkat antara Jepang dan Korea Selatan (Cotter, Bardach, & Morgan, 2019). Dengan demikian, Samudra Pasifik mendukung beberapa rute perdagangan paling penting di dunia.

“Evolusi” Asia Pasifik

Istilah Indo-Pasifik mungkin tampak baru bagi geopolitik, tetapi gagasan yang mendasarinya sama sekali tidak. Dalam beberapa hal Indo-Pasifik dipandang sebagai sebuah evolusi dari gagasan Asia Pasifik yang ada sejak sekitar akhir abad 20. Pasca perang dunia II, pada 1960-an Asia-Pasifik mendominasi konsepsi Asia (Medcalf, 2015). Ini umumnya dipahami sebagai wilayah yang menghubungkan Timur Laut dan Asia Tenggara dengan Oceania (dan karena itu Australia) dan Amerika. Sebagian besar tujuan gagasan ini adalah untuk mencerminkan dan memperkuat peran strategis dan ekonomi AS yang penting di Asia, serta keberhasilan negara-negara industri Asia Timur sebagai mitra dagang AS. Asia-Pasifik mencapai tingkat relevansi dan pelembagaan baru pada akhir 1980-an, dengan pembentukan proses Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Konsep Asia-Pasifik mulai goyah dengan dua faktor yang muncul pada 1990-an. Pertama, bangkitnya India sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang substansial dengan kepentingan di luar Asia Selatan. Kedua, meningkatnya koneksi antara kekuatan ekonomi Asia Timur dan wilayah Samudra Hindia, terkait terutama dengan permintaan energi dan sumber daya lainnya.

Gagasan Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik tidak terbentuk dengan sendirinya. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Gurpreet S. Khurana tahun 2007, seorang direktur eksekutif dari *National Maritime Foundation* di India dan pernah menjadi Kapten Angkatan Laut India, dalam artikelnya yang berjudul “*Security of Sea Lines: Prospect for India-Japan Cooperation*” (Kuo, 2018). Istilah Indo-Pasifik berawal dari konsep geografis yang berpadu dengan pandangan ekonomi. Dengan keberadaan peluang geo-ekonomi yang luar biasa serta tantangan keamanan yang krusial. Dimana tidak hanya untuk Asia, tetapi juga untuk seluruh dunia. Maka kemudian terbangun suatu konstruksi kawasan tunggal yakni Indo-Pasifik. Gambaran tersebut untuk menjelaskan penggabungan wilayah Samudera Hindia dan wilayah Pasifik Barat termasuk laut yang berdekatan di Asia Timur dan Asia Tenggara ke dalam konstruksi regional tunggal (Khurana, 2017). Kemudian lekat kaitannya Indo-Pasifik digunakan dalam konteks ungkapan geopolitik.

Dasar penting lain dari gagasan Indo-Pasifik adalah tumbuhnya keunggulan India. Kebangkitan kekuatan India di awal abad 21 menjadi salah satu pemicu Khurana dalam mencetuskan istilah Indo-Pasifik. Di tahun 1990an, India mengalami pertumbuhan ekonomi yang impresif dan cukup signifikan. Titik awal yakni penigkatan kerja sama AS-India di bidang ekonomi perdagangan maupun keamanan dan pertahanan(Iriawan, 2018). Hal ini menjadikan India dan Samudera Hindia tidak lagi dikesampingkan dalam geopolitik Asia. Meskipun "Indo" dalam "Indo-Pasifik" mewakili Samudra Hindia dan bukan India. Khurana mengharapkan India untuk memainkan peran utama, termasuk dalam hal memastikan lingkungan maritim yang kondusif untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal ini terhambat pada saat itu karena konstruk pandangan menggunakan ungkapan “Asia-Pasifik” sehingga tidak memadai dan ambigu dalam hal menggabungkan India dalam urusan kawasan. Alasan lain munculnya istilah Indo-Pasifik dilatarbelakangi oleh konteks meningkatnya ketegasan politik-militer China sehingga mengakibatkan peningkatan hubungan antara India dan Jepang sejak tahun 2006.

Indo-Pasifik menyumbang dua pertiga dari pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) karena Indo-Pasifik menyumbang setidaknya 60 persen dari GDP global (The Department of Defense USA, 2019). Wilayah ini mencakup ekonomi terbesar dunia yakni Amerika Serikat, China, dan Jepang. Selain itu terdapat enam negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia antaranya yaitu India, Kamboja, Laos, Myanmar, Nepal, dan Filipina.

Tabel 1 *Gross domestic product 2018*

Urutan	Negara	GDP (millions of US Dollars)
1.	Amerika Serikat	20,544,343
2.	China	13,608,152
3.	Jepang	4,971,323
4.	India	2,718,732
5.	Kanada	1,713,342
6.	Rusia	1,657,555
7.	Korea Selatan	1,619,424
8.	Australia	1,433,904
9.	Meksiko	1,220,699
10.	Indonesia	1,042,173

Sumber: <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators>

Kapabilitas Militer Negara Kawasan Indo-Pasifik

Militer menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh masing-masing negara. Kepemilikan militer yang baik akan menjadi daya jual atau daya saing untuk mempertahankan kedaulatan serta pengakuan dari negara lain. Oleh karenanya masing-masing negara memastikan untuk memperkuat kapabilitas militer, dari anggaran hingga kemampuan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Tabel 2 - Besar Peringkat Kekuatan Militer di Kawasan Indo-Pasifik 2020

1	Amerika Serikat
2	Rusia
3	China
4	India
5	Jepang
6	Korea Selatan
7	Mesir
8	Iran
9	Pakistan
10	Indonesia

Sumber: 2020 Military Strength Ranking, <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp>

Rivalitas Antara China dengan Amerika Serikat (Quadrilateral)

Peningkatan pengaruh China, semakin tak terelakkan, China telah menjadi pusat gravitasi baru di kawasan. Selain mempunyai ambisi yang sangat besar, China juga didukung oleh kekuatan ekonomi. Perhatian China ke Pasifik Selatan semakin meningkat dan intensif. China perlu mempertahankan lingkungan eksternal yang stabil yang kondusif bagi reformasi dan pertumbuhan ekonomi domestik. Saat ini China memperlakukan negara tetangga sebagai teman dan mitranya. China harus membuat mereka merasa aman dan membantu mereka untuk berkembang (Glaser, 2014).

Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan bantuan ekonomi yang diberikan China kepada negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengannya. China, juga tercatat sebagai pendonor peringkat ketiga setelah Australia dan AS, juga menawarkan berbagai paket bantuan keuangan yang bertujuan untuk memperkuat perdagangan, membangun infrastruktur, meningkatkan kemampuan pemerintah dan militer, serta mengembangkan sumberdaya alam (Dugis, 2015). Saat ini terdapat tiga Tujuan Keamanan Inti China di Asia, China sedang mengejar tiga tujuan inti keamanan di Asia Timur: melakukan kontrol atas "laut dekat" mempromosikan integrasi ekonomi regional yang berpusat di China dan membela dan memajukan klaim kedaulatan China (Glaser, 2014).

Salah satu inisiatif yang menarik perhatian dunia internasional adalah *Belt and Road Initiative* (BRI) pada tahun 2013. *One Belt One Road* (OBOR) bertujuan untuk mempromosikan aliran kegiatan ekonomi yang teratur dan bebas, alokasi sumber daya yang sangat efisien dan integrasi pasar yang mendalam, mendorong negara-negara untuk mencapai koordinasi kebijakan ekonomi dan melakukan kerja sama regional yang lebih luas serta lebih mendalam dengan standar yang lebih tinggi. Kemudian bersama-sama menciptakan arsitektur kerja sama ekonomi regional yang terbuka, inklusif, dan seimbang yang menguntungkan semua pihak. Visi dari *One Belt One Road Initiative* adalah untuk mewujudkan "*Five Link*", yang merujuk pada koordinasi kebijakan, infrastruktur, perdagangan, keuangan, dan manusia (Fung Business Intelligence Centre, 2015). BRI terdiri dari 2 komponen utama yaitu *the Silk Road Economic Belt* dan *the 21st Century Maritime Silk Road* (Anam & Ristiyani, 2018).

Kemudian di tahun 2017 merupakan tahun yang menarik dalam perkembangan wacana Indo-Pasifik, hal tersebut dikarenakan AS sebagai negara adidaya dan negara-negara besar di kawasan mengadopsi konsep Indo-Pasifik serta menghidupkan kembali "Quad". Kerangka kerja sama segi empat yang meliputi Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat dihidupkan kembali pada 2017 setelah pembekuan selama sekitar sepuluh tahun (Hanada, 2018)

Pada bulan April 2017, Kementerian Luar Negeri Jepang merilis "*Free and Open Indo-Pacific Strategy*" (MoFA Strategy) yang menggambarkan bagaimana Tokyo akan memperluas pandangan dunia dan peran strategisnya di bawah era Shinzo Abe yang ditentukan oleh keinginan untuk membuat "*proactive contribution to peace*" (Lee, 2018). Salah satu prioritas kebijakan Kerja Sama Pembangunan Jepang adalah mempromosikan kerja sama pembangunan strategis melalui FOIP dalam rangka mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. Sekitar tujuh bulan kemudian pada bulan November 2017, Australia mengeluarkan *2017 Foreign Policy White Paper* (Hanada, 2018). Di dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri 2017 tersebut terdapat lima tujuan yang sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran Australia, salah satunya yaitu "*promote an open, inclusive and prosperous Indo-Pacific region in which the rights of all states are respected*" (Australian Government, 2017).

Pada bulan Desember 2017, Gedung Putih merilis *The National Security Strategy of the United States of America* (NSS) (White House, 2017). Dalam NSS terdapat tujuan dasar yang harus dilakukan oleh AS. Pertama, tanggung jawab mendasar negara adalah melindungi rakyat dan tanah air AS. Kedua, berupaya untuk menciptakan kemakmuran bagi AS. Ketiga, menjaga perdamaian melalui kekuatan dengan membangun kembali militer sehingga tetap unggul, dan dapat menghalangi musuh sehingga mampu bertarung dan menang. Keempat, memajukan pengaruh AS di mata dunia.

Rivalitas juga terjadi dibidang investasi antara AS dan China. Ini adalah perbandingan lingkup investasi secara kasar.

Gambar 1 - Ketergantungan Perdagangan Luar Negeri Dari Kawasan Indo-Pasifik Pada Lima Negara Pada 1995-2016

Country/year	1995 (%)	2000 (%)	2005 (%)	2010 (%)	2015 (%)	2016 (%)
<i>Foreign trade dependence of ASEAN's GDP on the five countries</i>						
China	2.90	6.34	13.62	14.81	19.28	17.70
The U.S.	14.80	22.30	15.99	9.23	9.48	9.33
Japan	17.97	20.54	15.48	10.82	7.88	7.36
Australia	1.81	3.02	3.61	2.97	2.15	1.94
India	0.86	1.51	2.84	2.92	2.84	2.56
<i>Foreign trade dependence of SAARC's GDP on the five countries</i>						
China	0.64	0.94	2.59	3.96	4.08	3.83
The U.S.	3.02	3.86	3.75	3.20	3.13	2.99
Japan	1.73	1.23	0.94	0.93	0.70	0.66
Australia	0.33	0.38	0.70	0.92	0.51	0.47
India ^a	1.41	1.53	3.39	3.47	3.42	3.12
<i>Foreign trade dependence of GDP of GCC (Iraq and Iran) on the five countries</i>						
China	1.01	2.68	4.72	7.53	9.79	8.37
The U.S.	5.72	7.33	7.10	4.98	4.83	4.52
Japan	9.71	11.07	10.64	7.98	4.04	4.09
Australia	0.47	0.88	0.58	0.49	0.43	0.39
India	1.88	2.03	3.15	6.86	6.00	5.79
<i>Foreign trade dependence of COMESA's GDP on the five countries</i>						
China	0.57	1.21	3.55	6.18	5.84	5.34
The U.S.	3.05	2.86	3.88	2.87	1.69	1.38
Japan	1.52	1.05	1.51	0.93	0.53	0.45
Australia	0.11	0.28	0.26	0.25	0.11	0.09
India	0.63	0.60	1.19	1.72	1.77	1.57

Sumber: Annual Report on the Development of the Indian Ocean Region (2018). Indo-Pacific: Concept Definition and Strategic Implementation

Mengikuti perkataan Owen Jacobs terkait sifat VUCA pada lingkungan strategis saat ini apa yang terjadi di Indo-Pasifik sesuai dengan pendapat tersebut. kondisi Indo-Pasifik sebagai lingkungan strategis saat ini begitu cepat berubah-ubah. Sehingga melahirkan sebuah situasi dimana ketidak adanya kepastian, seperti ketidakpastian keamanan atau stabilitas di Indo-Pasifik. Hal tersebut didukung oleh kompleksitas hubungan antar negara dalam kawasan. dimana negara-negara yang ada sangat berjumlah banyak sehingga kerumitan hubungan antar negara semakin mempersulit negara untuk membuat Perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga banyak keputusan yang bersifat ambigu.

Indonesia dan Indo-Pasifik Prinsip Bebas-Aktif Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Prinsip bebas-aktif merupakan doktrin dasar dalam melihat kebijakan luar negeri Indonesia yang disampaikan Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul "Mendayung Antara Dua Karang" di Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 2 September 1948. Politik luar negeri Indonesia harus aktif bukan sesuatu yang diharapkan sikap dan tindakan yang pasif. Indonesia harus dapat menjadi subyek yang dapat menentukan kebijakannya sendiri. Aktif di sini adalah suatu kegiatan yang membentuk Indonesia untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan internasional yang menuju kepada terbentuknya ketertiban dunia. Dimana hal tersebut memiliki tiga unsur dasar yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan bebas yaitu bebas mengadakan hubungan dengan negara manapun dalam arti bebas menentukan sendiri

sikap dan keputusan-keputusan terhadap masalah-masalah internasional menurut nilai dan manfaatnya masing-masing tanpa mengikat diri kepada suatu blok. Prinsip bebas dan aktif dipilih untuk menolak tuntutan sayap kiri Uni Soviet dan di sisi lain Amerika Serikat (AS). Dengan kondisi saat ini berpedoman pada prinsip tersebut, Indonesia tidak akan memihak dalam setiap rivalitas antara *great powers*, termasuk antara AS dan China di Indo-Pasifik.

Dynamic Equilibrium dan Indo-Pacific Treaty

Di masa pemerintahan SBY, Indonesia memulai menaruh perhatian terhadap konsep Indo-Pasifik. Dalam rangka merespon kecenderungan konfliktual di kawasan karena hadirnya dua kekuatan baru, Marty menggagas konsep yang dinamakan *Dynamic Equilibrium*. Doktrin Natalegawa resmi digunakan oleh Indonesia sejak tahun 2011 sebagaimana tersurat dalam pidato pernyataan tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011).

Menteri luar negeri SBY, Marty Natalegawa mengeluarkan doktrin kebijakan luar negeri yang disebut *dynamic equilibrium*. Doktrin *dynamic equilibrium* dapat dikatakan sebagai prinsip bebas aktif yang diangkat ke level kawasan. Marty Natalegawa sendiri mengartikan "*Dynamic Equilibrium*" sebagai sebuah keselarasan dalam bekerjasama antar negara yang berinteraksi secara damai dan menciptakan rasa saling menguntungkan tanpa hadirnya sebuah kekuatan dominan tunggal di kawasan (Sutiono, Mahroza, & Yusgiantoro, 2019).

Dynamic equilibrium merupakan kondisi di mana tidak ada kekuatan dominan tunggal di kawasan bukan karena blok politik, namun lebih diakibatkan jenis hubungan internasional baru dengan penekanan pada keamanan bersama, kemakmuran bersama, dan stabilitas bersama (STATEMENT BY H.E.DR.R.M. MARTY M. NATALEGAWA MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA, 2011). Natalegawa menjelaskan tiga tantangan yang dihadapi di kawasan Indo-Pasifik untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di antaranya (Natalegawa, 2013). Pertama, adanya *trust-deficit*, kedua masih adanya klaim teritorial yang belum diselesaikan dan Ketiga, mengelola dampak perubahan yang ada pada wilayah Indo-Pasifik.

Doktrin Poros Maritim Dunia (PMD)

PMD didasari oleh kesadaran Indonesia akan terjadinya pergeseran pusat gravitasi geoekonomi dunia ke arah timur. Melihat kondisi geografis Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia, Samudera Pasifik dan Hindia, serta kawasan Asia Tenggara. Selain itu Indonesia sebagai Negara di "pertengahan" jalan memiliki 4 di antara 10 lokasi paling strategis dunia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar (INKINDO DKI Jakarta, 2016). Keempat lokasi ini berpotensi untuk menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan, dan maritim dunia. Oleh sebab itu Indonesia berpotensi besar menjadi Poros Maritim Dunia. Untuk merealisasikan ambisinya sebagai poros maritim, terdapat lima pilar utama yang perlu dilakukan Indonesia (Portal Informasi Indonesia, 2019). Lima pilar tersebut ialah budaya maritim, ekonmi maritim, konektivitas

maritim, diplomasi maritim, keamanan maritim. Apabila dilihat dari isi lima pilar tersebut dapat dikatakan Doktrin Poros Maritim Dunia sebagai lanjutan dari penerapan *Dynamic Equilibrium* atau sebagai strategi nyata dalam merealisasikan *Dynamic Equilibrium*.

Strategi Indonesia Mewujudkan *ASEAN Outlook On Indo-Pacific* (AOIP)

Dengan posisi saat ini Indonesia menghadapi persaingan antara kedua kekuatan besar yang tidak mudah. Di satu sisi, Indonesia ingin terus menjaga hubungan positif dengan China, terutama karena Indonesia mendapatkan investasi dari China untuk memperbaiki infrastruktur dan juga memperkuat industri domestik yang bisa membuka lapangan kerja. Di sisi lain, Indonesia pun sadar bahwa China bisa berpotensi besar untuk menciptakan instabilitas di Asia Tenggara, terutama sebagai pengancam persatuan ASEAN.

Menurut tulisan Kentaro Iwamoto 7 dari 10 anggota ASEAN lebih menyukai Cina daripada AS (Iwamoto, 2020). China menjadi pilihan oleh mayoritas responden yakni tujuh dari 10 negara ASEAN, dengan 69% dari Brunei mendukung negara itu, 58% dari Kamboja, 52% dari Indonesia, 74% dari Laos, 61% dari Malaysia, 62% dari Malaysia Myanmar dan 52% dari Thailand. AS adalah pilihan luar biasa di antara responden dari Filipina dan Vietnam masing-masing sebesar 83% dan 86%, diikuti oleh 61% dari Singapura (Iwamoto, 2020). Dukungan kuat yang ditunjukkan oleh responden Filipina dan Vietnam muncul sebagian karena pertengkaran laut yang sedang terjadi di negara mereka dengan Beijing di Laut China Selatan.

Kemudian menurut Muhamad Habib, salah satu Asisten Peneliti Di Departemen Hubungan Internasional CSIS, menurutnya “jika dilihat sekarang mungkin memang keliatan ada jarak antara mainland daratan ASEAN itu seperti Kamboja, Laos, Myanmar itu yang lebih dekat dengan China dibandingkan dekat dengan AS. Dibandingkan misalnya negara-negara maritim ASEAN misalnya Singapura, Filipina, Vietnam, Indonesia yang memang juga relative lebih dekat dengan AS. Tetapi bukan berarti kemudian kita berpihak kepada salah satu negara berkekuatan besar ini” (Habib, 2019). Lalu menurut Ibu Rahmawati, Kepala Bidang Kerja Sama ASEAN, Kerja Sama Intrakawasan dan Kerja Sama Antarkawasan Kementerian Luar Negeri mengatakan “memang secara bilateral beberapa negara itukan memang ada kecenderungan lebih dekat dengan negara lain. Negara-negara Indo-Cina pasti lebih dekat dengan tetangganya yaitu China. Mungkin negara kayak Filipina sama Singapura mungkin lebih dekat dengan AS. That’s way kita Indonesia dengan politik Bebas-Aktif kita gamau seperti itu ASEAN” (Rahmawati, 2019).

Dengan tersirat terbentuknya skema “peta politik” atau “kecenderungan kedekatan” antar negara tersebut nampaknya cukup membahayakan bagi keberlangsungan ASEAN. Secara lingkungan yang begitu bersaing Indonesia tidak bisa bekerja sendiri, oleh karenanya Indonesia harus memaksimalkan ASEAN guna mencapai kepentingan dan kebaikan bersama.

Ide Indonesia mengusulkan pembetulan pandangan ASEAN terhadap kawasan Indo-Pasifik merupakan usulan yang baik guna menjaga sentralitas ASEAN. Dalam konteks *Security Community*, pembentukan norma dan identitas pada ASEAN justru sudah

memiliki basis yang dapat dikembangkan. Prinsip-prinsip kedaulatan dan non-interferensi yang selama ini banyak dianggap sebagai halangan bagi integrasi Asia Tenggara justru sebenarnya adalah modalitas semakin memperkuat nilai, identitas dan norma-norma. ASEAN berjalan di bawah prinsip yang disebut “ASEAN Way” yang berarti menghormati kedaulatan nasional, non-intervensi, dan penyelesaian masalah melalui cara damai. Oleh karenanya identitas yang sudah terbangun penting menjadi penyangga utama organisasi. Meskipun hubungan kausalitas antara prinsip-prinsip tersebut dengan stabilitas ASEAN, tentu mengharuskan kajian lebih dalam lagi dan tetap banyak yang di perbaiki. Kemudian elemen kunci yakni memiliki hubungan banyak sisi dan langsung. Jelas hubungan antar negara asia tenggara ini sangat banyak, dari yang secara bilateral hingga multilateral. Waktu pelaksanaan yang didasari minat jangka panjang juga sudah terbukti, ASEAN hingga kini sudah 53 tahun dapat berjalan dengan baik.

Lahirnya dokumen tersebut dilakukan Indonesia dengan melakukan serangkaian strategi dan proses. Bermula dengan instruksi Menteri Luar Negeri pada saat Rakor Keppri bulan Februari 2018, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) disertai tugas untuk mengembangkan Konsep Indo-Pacific. Setelah melalui berbagai konsultasi yang intensif dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga kajian, K/L, dan perwakilan RI di luar negeri (melalui *Video Conference*), akhirnya berhasil dirumuskan suatu dokumen dengan judul “*Indonesia’s Perspective for an ASEAN Outlook on Indo-Pacific: Towards a Peaceful, Prosperous, and Inclusive Region*” (Kementerian Luar Negeri, 2019).

Konsep tersebut di diplomasikan oleh Menteri Retno Marsudi, Presiden Joko Widodo dan para diplomat Indonesia di pertemuan-pertemuan formal dan non formal, seperti KTT ke-32 ASEAN dilaksanakan pada 27-28 April 2018, *ASEAN Foreign Ministers’ Meeting* Singapura 30 Juli – 4 Agustus 2018, KTT ke-33 ASEAN, KTT Asia Timur (East Asian Summit) ke 13, *ASEAN Foreign Ministers’ Retreat* on 17-18 January 2019 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN berlangsung pada 20 – 23 Juni 2019 di Bangkok, Thailand.

Akhirnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 yang mengusung tema *ASEAN Partnership for Sustainability* telah berlangsung pada 20-23 Juni 2019 di Bangkok, Thailand. Diadopsilah menjadi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific/ AOIP* (Pandangan Bersama ASEAN tentang konsep Indo-Pasifik) (Roza, 2019). Dokumen ini merupakan pandangan resmi pertama ASEAN yang disampaikan kepada publik mengenai konsep Indo-Pasifik di tengah menguatnya persaingan kekuatan-kekuatan besar di kawasan ini. *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* mengusulkan 4 bidang kerja sama yaitu bidang maritim, konektivitas, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi.

Secara sifat diplomasi Indonesia melalui pertemuan-pertemuan ini yaitu diplomasi multilateral. Hal tersebut dikarenakan diplomasi yang dilakukan berurusan dengan beberapa pemerintah secara bersamaan. Pembentukan AOIP tersebut pun merupakan tujuan dari Proyek Bersama (*Joint projects*) dan secara reaktif (*reactively*) yang dilakukan ASEAN melalui inisiasi Indonesia, hal tersebut didasari bahwa langkah ini dianggap efektif untuk dapat menangani permasalahan bersama dalam tubuh ASEAN terkait sentralitasnya. Kemudian bertujuan mengelola lingkungan eksternal (*Managing the*

external environment), dari disepakatinya AOIP yang tadinya pandangan tersebut sebagai acuan ASEAN diharapkan dapat diterapkan sebagai acuan sebagai seluruh aktor yang ada ditingkat global. Selanjutnya membuat kesepakatan yang saling menguntungkan (*Mutually beneficial deals*) bagi semua pihak melalui empat poin yang disepakati dalam AOIP. Serta bertujuan melangsungkan agenda domestik Indonesia dimana sedang membangun sebagai negara PMD.

Menurut John Lovel setiap negara yang mengembangkan kebijakan luar negeri berusaha menerapkan tipe strategi yang bisa dijelaskan dengan menelaah penilaian para pembuat keputusan tentang strategi lawan dan perkiraan mereka tentang kemampuan sendiri (Yani, 2010). Lovel menyebutnya ini adalah Model Strategik/Model Rasional. Pendapat seperti ini juga disampaikan oleh William D. Coplin, yang disebut model strategi aktor rasional. Prespektif ini merujuk pada (1) *leadership strategy* yang berkaitan dengan upaya menghilangkan kekerasan dalam setiap masalah kebijakan luar negeri, (2) *concordance strategy* mengacu pada upaya saling menguntungkan (3) *accommodation strategy* artinya keseimbangan ketika ada negara yang dominan kapabilitasnya, dan (4) *confrontation strategy* ketika kemampuan suatu negara meningkat dan tidak bisa diimbangi (Fathun, 2019).

Dalam proses untuk mewujudkan konsep yang diusung oleh Indonesia, maka melalui model tersebut pendekatan Indonesia lebih cenderung kolaborasi *leadership strategy* dan *accommodation strategy*. Berdasarkan *leadership strategy* dan *accommodation strategy* maka logika berpikirnya adalah *rational choice* dengan basis pendekatan *soft power*. Menggunakan strategi keras atau konfrontasi akan menambah kekacauan dan akan semakin sulit untuk menyatukan negara-negara Asia Tenggara. *Leadership strategy* dan *accommodation strategy* ini dilakukan dengan argumentasi bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki nama baik di ASEAN dan negara yang berprinsip politik bebas-aktif sehingga berusaha untuk mengakomodasi dalam usaha menjaga perdamaian. Karakter yang ditunjukkan yakni Indonesia berusaha memberi konsep tetapi tidak memaksa negara lain untuk boleh berpendapat berbeda dengan Indonesia namun mencari persamaan agar mendapatkan kesepakatan bersama.

Kesimpulan

Setelah melakukan rangkaian proses, diplomasi dan negosiasi pada dinamika organisasi akhirnya konsep Indo-Pasifik Indonesia dipercaya dan disetujui ASEAN. Konsep tersebut diadopsi ASEAN sehingga bernama *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, disepakati pada KTT ASEAN di Bangkok, 22 Juni 2019. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa strategi diplomasi Indonesia dalam menyampaikan sebuah pandangan telah berhasil. Ini merupakan penting bagi kita bahwa Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas kawasan, perdamaian dunia dan menjaga keutuhan ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. London: Routledge.
- Adler, E., & Barnett, M. (1998). *Security Communities*. Cambridge University Press.
- Aksoy, M. (2018). Redefining Diplomacy in The 21st Century & Examining The Characteristics of an Ideal Diplomat. *Manas Journal of Social Studies* .
- Al Jazeera. (2016). Beijing's South China Sea claims scrutinised at summit. Diakses pada October 14, 2017, dari Al Jazeera News and Agency: <http://www.aljazeera.com/news/2016/09/south-china-sea-row-overshadows-asean-summit-160907051502873.html>
- Albert, E. (2016). Competition in the Indian Ocean. Diakses pada 6 Mei 2020, dari Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/background/competition-indian-ocean>
- Anam, S., & Ristiyani. (2018). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping.
- Australian Government. (2017). *2017 Foreign Policy White Paper* . Australia: Australian Government.
- Bender, J. (2015). China wants to build giant floating islands in the South China Sea. Diakses pada 18 Desember 2017 dari Business Insider: <http://www.businessinsider.com/china-to-build-giant-floating-islands-2015-8/?IR=T>
- Center for Strategic and International Studies. (2016). Tensions in the South China Sea explained in 18 maps. Diakses pada 30 September 2017, dari Business Insider: <http://www.businessinsider.com/tensions-in-the-south-china-sea-explained-in-18-maps-2015-1/?IR=T/#1a-political-map-1>
- Cotter, C. H., Bardach, J. E., & Morgan, J. R. (2019). Pacific Ocean. Diakses pada 4 April 4 2020 dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/place/Pacific-Ocean>
- Cronin, P. M. (2013). *The Strategic Significance of the South China Sea. Managing Tensions in the South China Sea*. Center for Strategic & International Studies.
- Cruz de Castro, R. (2017a). 21st Century Japan-Philippines Strategic Partnership: Constraining China's Expansion in the South China Sea. *Asian Affairs: An American Review* , 44 (2), 31-51.
- Cruz De Castro, R. (2015). President Aquino's Visit to Tokyo Boosts Philippine-Japan Partnership in Maritime Security. Diakses pada 25 Januari 2018 dari Asia Maritime Transparency Initiative: <https://amti.csis.org/president-aquinos-visit-to-tokyo-boosts-philippine-japan-partnership-in-maritime-security/>
- Cruz de Castro, R. (2016b). President Duterte Maintains Philippine-Japanese Partnership as He "Pivots" to China. Diakses pada 25 Januari 2018 dari Asia Maritime Transparency Initiative: <https://amti.csis.org/president-duterte-maintains-philippine-japanese-partnership-pivots-china/>
- Cruz de Castro, R. (2016a). The Duterte Administration's Foreign Policy: Unravelling the Aquino Administration's Balancing Agenda on an Emergent China. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* .

- Department of National Defense Philippines. (2015). Quest for Peace. Philippine Defense Newsletter , 5 (1).
- Deutsch, K. W. (1957). Political Community and the North American Area. New Jersey: Princeton University Press.
- Dingli, S., Economy, E., Haass, R., Kurlantzick, J., Smith, S. A., & Tay, S. (2016). China's Maritime Dispute. Diakses pada January 2, 2018, dari Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/interactives/chinas-maritime-disputes#!/>
- Dominguez, G., & Mazumdar, S. (2015). Are South China Sea tensions triggering an arms race? Diakses pada 4 Oktober 2017 dari Deutsche Welle: <http://www.dw.com/en/are-south-china-sea-tensions-triggering-an-arms-race/a-18927467>
- Drifte, R. (2016). Japan's Policy towards the South China Sea - Applying "Proactive Peace Diplomacy"? Frankfurt am Main: Peace Research Institute Frankfurt.
- Dugis, V. M. (2015). Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan Perspektif Realisme Strategik.
- Fathun, L. M. (2019). Geostrategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Produktivitas Ekspor Ikan. Unpar .
- Frank, L. (2016). The Czech Republic Security Environment. 7.
- Fung Business Intelligence Centre. (2015). The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road.
- Future Directions International. (2012). Indian Ocean: A Sea of Uncertainty. In L. G. Luke, & C. O'Loughlin, Critical Issues in the Indian Ocean Region to 2020. West Perth: Future Directions International.
- Gilsinan, K. (2015). Cliché of the Moment: 'China's Increasing Assertiveness'. Diakses pada 14 Oktober 2017 dari The Atlantic: <https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/south-china-sea-assertiveness/407203/>
- Glaser, B. S. (2014). China's Grand Strategy in Asia. Center for Strategic and International Studies (CSIS) .
- Guillot, W. M. (2003). Strategic Leadership: Defining the Challenge . Air and Space Power Journal - Winter 2003 , 68.
- Habib, M. (2019). Strategi Indonesia Mewujudkan AOIP untuk Menciptakan Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik. Wawancara.
- Hanada, R. (2018). The Role of U.S.-Japan-Australia-India Cooperation, or the "Quad" in FOIP: A Policy Coordination Mechanism for a Rules-Based Order. CSIS .
- Herindrasti, V. S. (2019). FENOMENA INDO-PASIFIK DAN DIPLOMASI INDONESIA. Jurnal Asia Pacific Studies .
- Hornung, J. W. (2015). Gauging Japan's 'Proactive Contributions to Peace'. Diakses pada 25 Januari 2018 dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2015/10/gauging-japans-proactive-contributions-to-peace/>
- IHS. (2016). Growing Tensions Around South China Sea to Drive Defence Spending in APAC. Diakses pada 3 Oktober 2017 dari IHS Markit:

- <http://news.ihsmarket.com/press-release/aerospace-defense-security/growing-tensions-around-south-china-sea-drive-defence-spend>
- INKINDO DKI Jakarta. (2016). *Pembangunan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. In I. D. Jakarta, Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. DKI Jakarta: INKINDO DKI Jakarta.
- Iriawan, S. (2018). *Diskursus Indo-Pasifik: Hegemoni Amerika, Persaingan Strategis, Hingga Transformasi Geopolitik Kawasan*. Mandala , 284.
- Iwamoto, K. (2020). 7 of 10 ASEAN members favor China over US: survey. Diakses pada 1 Juni 2020 dari Nikkei Asian Review: <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/7-of-10-ASEAN-members-favor-China-over-US-survey>
- JICA. (2013). Signing of Japanese ODA Loan Agreement with the Republic of the Philippines. Diakses pada 25 Januari 2018 dari JICA: https://www.jica.go.jp/english/news/press/2013/131216_01.html
- JICA. (2016). Signing of Japanese ODA Loan Agreement with the Republic of the Philippines: Further strengthening the maritime safety capability of the Philippine Coast Guard. Diakses pada 25 Januari 2018, dari JICA: https://www.jica.go.jp/english/news/press/2016/161026_01.html
- Kelly, T., & Kubo, N. (2017). Japan said to offer chopper parts to Philippines as counter to China. Diakses pada 25 Januari 2018 dari Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/11/national/politics-diplomacy/japan-said-offer-chopper-parts-philippines-counter-china/#.Wmy4cKiWbIV>
- Kementerian Luar Negeri. (2019). *Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Luar Negeri 2018*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2011). *Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Khurana, G. S. (2017). *The 'Indo-Pacific' Concept: Retrospect and Prospect*. National Maritime Foundation .
- Kuo, M. A. (2018). *The Origin of 'Indo-Pacific' as Geopolitical Construct: Insight dari Gurpreet Khurana*. Diakses pada 27 Januari 2020, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2018/01/the-origin-of-indo-pacific-as-geopolitical-construct/>
- Lee, J. (2018). *Trends in Southeast Asia: THE "FREE AND OPEN INDO-PACIFIC" AND IMPLICATIONS FOR ASEAN*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Medcalf, R. (2015). *Reimagining Asia: Dari Asia-Pacific to Indo-Pacific*. Diakses pada 30 Maret 2020 dari The ASEAN Forum: <http://www.theasanforum.org/reimagining-asia-dari-asia-pacific-to-indo-pacific/>
- Michel, D., & Sticklor, R. (2012). *Indian Ocean Rising: Maritime and Security Policy Challenges*. In *Indian Ocean Rising: Maritime and Security Policy Challenges*. Washington DC: Stimson.
- Mière, C. L. (2014). *Maritime Diplomacy in the 21st Century*. New York: Routledge.

- Ministry of Defense of Japan. (2017a). A Strategic analysis of the South China Sea territorial issues. Diakses pada 19 Desember 2017 dari Japanese Ministry of Defense: <http://www.mod.go.jp/msdf/navcol/SSG/topics-column/images/t-049/049-02.pdf>
- Ministry of Defense of Japan. (2017b). Defence White Paper 2017. Diakses pada 6 Desember 2017 dari Ministry of Defense: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2017.html
- Ministry of Defense of Japan. (2015a). Joint Press Release. Diakses pada 25 Januari 2018 dari Ministry of Defense of Japan: http://www.mod.go.jp/j/press/youjin/2015/01/29a_jpr_e.pdf
- Ministry of Defense of Japan. (2015b). Memorandum on Defense Cooperation And Exchanges Between The Mod of Japan and The DnD of The Republic of The Philippines. Diakses pada 25 Januari 2018 dari Ministry of Defense of Japan: http://www.mod.go.jp/j/press/youjin/2015/01/29a_memo_e.pdf
- Ministry of Defense of Japan. (2015c). Press Conference by the Defense Minister Nakatani (08:45-09:02 A.M. May 12, 2015). Diakses pada 25 January 2018, dari Ministry of Defense of Japan: <http://www.mod.go.jp/e/press/conference/2015/05/12.html>
- Ministry of Defense of Japan. (2012). STATEMENT OF INTENT ON DEFENSE COOPERATION AND EXCHANGES BETWEEN DND OF PHILIPPINES AND MOD OF JAPAN. Diakses pada 25 Januari 2018 dari Ministry of Defense of Japan: http://www.mod.go.jp/j/press/youjin/2012/07/02_st_e.pdf
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2015). Japan-Philippines Joint Declaration: A Strengthened Strategic Partnership for Advancing the Shared Principles and Goals of Peace, Security, and Growth in the Region and Beyond. Diakses pada 20 Januari 2018 dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: http://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/ph/page4e_000280.html
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2016a). Japan-Philippines Joint Statement. Diakses pada 24 Januari 2018 dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: <http://www.mofa.go.jp/files/000198399.pdf>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2013). Japan-Philippines Summit Meeting. Diakses pada 11 November 2017 dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: http://www.mofa.go.jp/region/page6e_000121.html
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2016b). Japan-Philippines Summit Meeting. Diakses pada 25 Januari 2018 dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: http://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/ph/page3e_000568.html
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2017). Priority Policy Development Cooperation FY2017. Diakses pada 25 January 2018 dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: <http://www.mofa.go.jp/files/000259285.pdf>
- Mollman, S. (2016). The line on a 70-year-old map that threatens to set off a war in East Asia. Diakses pada 2 October 2017 dari Quartz: <https://qz.com/705223/where-exactly-did-chinas-nine-dash-line-in-the-south-china-sea-come-dari/>

- Montratama, I. (2016). Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Indo-Pasifik Abad Ke-21. *Journal of International Studies* , 37.
- Morgenthau, J. (1948). *Politic among nation: The Struggle for power and peace*. New York: Alfred A.Knopf.
- Natalegawa, R. M. (2013). *An Indonesian Perspective on the Indo-Pacific*. Wahington DC: CSIS.
- National Economic and Development Authority Philippines. (2017a). ODA Portfolio Report Review 2016. Diakses pada 25 Januari 2018 dari National Economic and Development Authority Philippines: <http://www.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2017/11/ODA-2016-As-of-August-22-2017.pdf>
- Nirmala, M. (2016). Japan's New ASEAN Diplomacy: Strategic Goals, Patterns, and Potential Limitations under the Abe Administration. *International Journal of Social Science and Humanity* , 6 (12), 952-957.
- Nuechterlein, D. E. (1976). *National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*. *British Journal of International Studies* .
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang*. Solo: Cakra Books.
- Parameswaran, P. (2017). What's Next for Japan-Philippines Defense Relations Under Duterte? Diakses pada 25 Januari 2018 dari *The Diplomat*: <https://thediplomat.com/2017/02/whats-next-for-japan-philippines-defense-relations-under-duterte/>
- Permanent Court of Arbitration. (2016). Award in the South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. the People's Republic of China). Diakses pada 15 Januari 2018 dari Permanent Court of Arbitration: <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf>
- Portal Informasi Indonesia. (2019). Indonesia Poros Maritim Dunia. Diakses pada 30 Mei 2020 dari Portal Informasi Indonesia: <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>
- Purnama, A. C. (2017). GAGASAN INDONESIA MENGENAI INDO-PACIFIC TREATY: PROSPEK DAN MASALAH. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* .
- Putra, I. N., & Hakim, A. (2016). ANALISA PELUANG DAN ANCAMAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS. *ASROJURNAL-STTAL* Vol. 6 .
- Rahmawati. (2019). Strategi Indonesia Mewujudkan AOIP untuk Menciptakan Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik. Wawancara.
- Roza, R. (2019). Pandangan ASEAN Terhadap Indo-Pasifik. *Pusat Penelitain DPR* , 8.
- Saha, P. (2018). The Quad in the Indo-Pacific: Why ASEAN Remains Cautious. *Observer Research Foundation (ORF)* , 7.
- Shoji, T. (2014). The South China Sea: A View dari Japan. Diakses pada November 8, 2017, dari National Institute for Defense Studies - Ministry of Defense:

- http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/2014/bulletin_e2014_7.pdf
- Silver, L. (2017). How people in Asia-Pacific view China. Diakses pada 17 Januari 2018 dari Pew Research Center: <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/10/16/how-people-in-asia-pacific-view-china/>
- Simon, S. (2015). US-Southeast Asia Relations: Courting Partners. *Comparative Connections*, 16 (2), 53-64.
- Sokolsky, R., Rabasa, A., & Neu, C. R. (2001). *The Role of Southeast Asia in U.S. Strategy Toward China*. Santa Monica: Rand Corporation.
- Sondermann, F. A. (1960). *The concept of national interest*. USA: Prentice-Hall, Inc.
- Statement by H.E.Dr.R.M. Marty M. Natalegawa Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia. (2011). New York: The General Debate of The 66th Session of The United Nations General Assembly.
- Sutiono, Mahroza, J., & Yusgiantoro, P. (2019). Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Kawasan Asean Melalui Konsep Dynamic Equilibrium. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*.
- Tertia, J., & Perwita, A. A. (2018). Maritime Security In Indo-Pacific: Issues, Challenges And Prospects. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- The Department of Defense USA. (2019). *Indo-Pacific Strategy Report*. The Department of Defense USA.
- The Global Firepower. (2017). 2017 Military Strength Ranking. Diakses pada 2 Januari 2018 dari The Global Firepower: <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp>
- Trajano, J. C. (2013). Japan-Philippines Strategic Partnership: Converging Threat Perception. Diakses pada 11 November 2017 dari RSIS Nanyang Technological University: <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/2034-japan-philippines-strategic-pa/#.WgcwgmICzIU>
- Turcsányi, R. Q. (2017). *Chinese Assertiveness in the South China Sea*. Cham: Springer International Publishing.
- Verlaan, P. A., Morgan, J. R., & Kanayev, V. F. (2020). Indian Ocean. Diakses pada 4 April 2020 dari Encyclopædia Britannica: <https://www.britannica.com/place/Indian-Ocean>
- Vice, M. (2017). In global popularity contest, U.S. and China – not Russia – vie for first. Diakses pada 20 Februari 2018 dari Pew Research Center: <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/23/in-global-popularity-contest-u-s-and-china-not-russia-vie-for-first/>
- Walker, R. A. (2004). *Multilateral Conference: Purposeful International Negotiation*. New York: Palgrave Macmillan.
- White House. (2017). *National Security Strategy of the United States of America (NSS)*. Washington DC: White House.

- Yakti, P. D., & Susanto, J. (2011). Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi iMaritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesenambungan Strategi? *Global & Strategis* .
- Yani, Y. M. (2010). Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praksis. Diakses pada 4 June 2020 dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf
- Zhou, W. (2015). China's growing assertiveness in the South China Sea. Diakses pada 28 Oktober 28 2017 dari Elcano Royal Institute: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/asia-pacific/ari60-2015-chinas-growing-assertiveness-in-the-south-china-sea